

## GREEN ACCOUNTING: IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA YANG BERKELANJUTAN

Made Andy Pradana Sukarta<sup>1</sup>, I Gede Dirga Surya Arya Widhyadanta<sup>2</sup>, I Nyoman Darmayasa<sup>3</sup>, Ni Kadek Cahya Dwi Utami<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Bali State of Polytechnic  
[andypradana@pnb.ac.id](mailto:andypradana@pnb.ac.id)

Diterima: 01/10/2025

Diterima: 28/10/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.226-234>

### Abstract

*Sustainable village economic development requires a balance between economic, social, and environmental dimensions. This study analyzes the role of the Village Credit Institution (LPD) of Canggu in integrating Green Accounting with the local philosophy of Tri Hita Karana. Using a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews, documentation, and triangulation involving supervisors, managers, and clients of the LPD. The findings reveal that the values of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan are embedded in LPD practices through support for religious rituals, social welfare programs, and environmentally friendly initiatives. This integration strengthens the implementation of Green Accounting and fosters village development rooted in local culture. The study highlights the contribution of LPD as an inclusive and sustainable traditional financial institution aligned with the Triple Bottom Line framework.*

**Keyword: Green Accounting, Tri Hita Karana, LPD**

### Abstrak

Pembangunan ekonomi desa berkelanjutan menuntut keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Canggu dalam mengintegrasikan konsep *Green Accounting* dengan filosofi lokal Tri Hita Karana. Dengan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi dari pengawas, pengelola, serta nasabah LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan terinternalisasi dalam praktik keuangan LPD melalui dukungan ritual keagamaan, program kesejahteraan sosial, dan inisiatif ramah lingkungan. Integrasi ini memperkuat penerapan *Green Accounting* dan mendukung pembangunan desa berbasis budaya lokal. Temuan penelitian menegaskan kontribusi LPD sebagai model kelembagaan keuangan tradisional yang inklusif, berkelanjutan, serta relevan dalam kerangka *Triple Bottom Line*.

**Kata Kunci: Green Accounting, Tri Hita Karana, LPD**

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan **Green Accounting** menjadi semakin relevan. Green Accounting tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi, pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami serta mengelola dampak ekologis dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjamin.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah **Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**. LPD merupakan lembaga keuangan berbasis komunitas yang dibentuk di Bali dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa. Berlandaskan prinsip kearifan lokal, LPD berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat adat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien dan berkelanjutan. Peran LPD tidak hanya berfokus pada

## **Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan**

---

pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks Bali, penerapan Green Accounting dapat diselaraskan dengan filosofi **Tri Hita Karana**, yang menekankan pentingnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan lingkungan (Palemahan). Filosofi ini mencerminkan cara hidup masyarakat Bali yang kental dengan nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Dengan mengintegrasikan Tri Hita Karana ke dalam operasional LPD, lembaga ini mampu menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan, sehingga tetap relevan di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Lebih jauh, LPD juga berperan dalam memperkuat fondasi spiritual dan budaya masyarakat desa. Melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan upacara adat, LPD tidak hanya menjaga kelestarian identitas budaya Bali, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat dengan Tuhan serta menumbuhkan rasa syukur dan kebersamaan. Peran ini memperkuat moral dan etika dalam pengelolaan keuangan serta aktivitas ekonomi desa, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat material tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Selain sebagai lembaga keuangan, LPD juga berfungsi sebagai **jembatan sosial** yang memastikan pembangunan desa berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. LPD menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, mendorong terciptanya kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis masyarakat, yang mencerminkan penerapan nyata dari filosofi Tri Hita Karana dalam bidang keuangan.

Kontribusi desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional juga tidak dapat diabaikan. Desa memiliki peran strategis dalam mencapai kemandirian bangsa melalui pembangunan yang seimbang antara partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa esensi pembangunan desa terletak pada keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berkelanjutan harus dirancang berdasarkan prinsip yang jelas, merata, dan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun penelitian tentang LPD telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada fungsi LPD sebagai lembaga simpan pinjam dan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat adat (Bagiada & Darmayasa, 2015; Darmayasa & Aneswari, 2016). Kajian yang lebih baru menyoroti peran LPD dalam pemberdayaan ekonomi berbasis sosial dan budaya (Widnyani & Astitiani, 2022), namun belum secara eksplisit menempatkan *Green Accounting* sebagai kerangka analisis utama. Di sisi lain, riset mengenai penerapan Tri Hita Karana banyak ditemukan pada konteks pariwisata berkelanjutan (Ariasih & Suarmanayasa, 2024), sementara integrasinya dengan praktik akuntansi dan pengelolaan lembaga keuangan tradisional masih relatif terbatas.

Gap ini menunjukkan adanya kekosongan literatur pada persinggungan antara *Green Accounting*, Tri Hita Karana, dan peran LPD dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan kata lain, bagaimana nilai-nilai lokal dapat memperkuat praktik akuntansi berkelanjutan di lembaga keuangan komunitas belum banyak dieksplorasi secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi Tri Hita Karana dalam mendukung pembangunan ekonomi Desa Adat Canggü melalui peran LPD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana implementasi Tri Hita Karana dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan melalui peran LPD?**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

LPD semakin menunjukkan perannya sebagai lembaga keuangan desa adat yang dipercaya masyarakat dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Junaedi et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi krama desa adat di Bali meningkat dengan adanya LPD. Keberadaan LPD ini menjadi contoh nyata keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adat. LPD merupakan lembaga keuangan berbasis anggota, di mana masyarakat berperan sebagai penyeton sekaligus pengguna dana. Skema tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan menyediakan akses modal, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk krama desa (Damayanti et al., 2019).

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

---

LPD menyediakan akses permodalan yang memudahkan masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Selain untuk modal usaha, pinjaman dari LPD juga dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kebutuhan strategis seperti pengembangan UMKM, kegiatan pertanian, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, yang secara langsung mendukung pembangunan ekonomi desa adat (Damayanti et al., 2019; Jati et al., 2024; Sadiartha, 2017). LPD memberikan kemudahan akses kredit bagi UMKM melalui persyaratan yang tidak rumit, sehingga lebih praktis dibandingkan perbankan konvensional. Kondisi ini mendorong lahir dan berkembangnya UMKM di desa adat (Sadiartha, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi penting Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat adat di Bali. (Bagiada & Darmayasa, 2015) menegaskan bahwa LPD berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui fungsi simpan pinjam berbasis komunitas. (Darmayasa & Aneswari, 2016) menemukan bahwa LPD mendukung pemberdayaan masyarakat desa adat dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat jejaring sosial antarwarga.

Penelitian selanjutnya oleh (Widnyani & Astitiani, 2022) menyoroti peran LPD dalam penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan laba untuk kepentingan sosial dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Sementara itu, penelitian (Ariasih & Suarmanayasa, 2024) lebih banyak menekankan penerapan filosofi Tri Hita Karana dalam sektor pariwisata berkelanjutan, bukan pada lembaga keuangan.

Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek sosial budaya serta fungsi simpan pinjam LPD. Studi yang secara khusus menghubungkan praktik *Green Accounting* dengan filosofi Tri Hita Karana di lembaga keuangan tradisional masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengeksplorasi integrasi nilai kearifan lokal dengan pendekatan akuntansi berkelanjutan.

**Konsep Triple Bottom Line** (Elkington, 1999) menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan tiga pilar utama: Profit, People, dan Planet. Profit mengacu pada pencapaian keuntungan ekonomi, People menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan, sedangkan Planet menekankan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks lembaga keuangan komunitas, TBL menjadi kerangka analisis untuk menilai apakah aktivitas ekonomi benar-benar berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Filosofi lokal Bali, **Tri Hita Karana**, menekankan keharmonisan dalam tiga dimensi: hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan sesama (Pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan (Palemahan). Nilai ini telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali, baik dalam praktik spiritual maupun sosial. Penerapan THK dalam konteks lembaga keuangan tradisional seperti LPD dapat menjadi instrumen kultural yang memperkuat implementasi *Green Accounting*. Integrasi ini dapat menjadi kerangka analitis untuk memahami bagaimana LPD mengimplementasikan *Green Accounting* sekaligus mempertahankan identitas budaya lokal.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus** untuk menganalisis peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Cangu dalam mengintegrasikan *Green Accounting* dengan filosofi Tri Hita Karana. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian dilakukan di LPD Desa Adat Cangu, yang dipilih secara purposif karena Cangu mengalami transformasi signifikan dari desa agraris menjadi pusat ekonomi berbasis pariwisata dan digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan LPD. Mereka terdiri atas pengawas LPD provinsi, pengurus LPD, karyawan, serta nasabah. Proses wawancara dilakukan hingga mencapai **saturation point** (kejenuhan data), di mana tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif dikemukakan oleh (Miles et al., 2014). Pengujian validitas dan reliabilitas data menggunakan triangulasi (*cross check*) terhadap data. Adapun model analisis interaktif tersebut meliputi:

### Teknik Pengumpulan Data

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

1. Wawancara mendalam dengan pengawas, pengurus, karyawan, dan nasabah LPD untuk menggali pemahaman terkait implementasi Tri Hita Karana dan praktik Green Accounting.
2. Dokumentasi, berupa laporan keuangan, perarem desa, dan dokumen kebijakan internal LPD.
3. Observasi partisipatif terbatas, khususnya pada kegiatan adat, sosial, dan lingkungan yang melibatkan kontribusi LPD.

### Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994), yang meliputi:

- Reduksi data: mengelompokkan temuan sesuai dimensi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- Penyajian data: menyusun matriks temuan lapangan yang dibandingkan dengan teori *Triple Bottom Line* dan Tri Hita Karana.
- Penarikan kesimpulan/verifikasi: melakukan interpretasi dengan cara triangulasi antar-sumber data (wawancara, dokumen, observasi).

Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara diverifikasi dengan dokumen resmi dan observasi lapangan. Selain itu, dilakukan member check dengan informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan melakukan teknik wawancara mendalam guna memperoleh informasi dan pemahaman komprehensif khususnya terkait peran sosial dalam konteks ekonomi lokal dan pengembangan keuangan desa. Penelitian kualitatif secara umum dilakukan dalam konteks natural atau setting yang alami, menguji apa yang seharusnya terjadi (Murdiyanto, 2020) Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai objek penelitian melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *purposive* dan dilanjutkan dengan metode *snowball* hingga informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Data penelitian bersumber dari data primer maupun sekunder.

Penelitian diawali dengan melakukan wawancara dengan konteks praktik fungsi sosialnya dalam bidang ekonomi lokal dan pembangunan keuangan desa sudah dilaksanakan di LPD Desa Adat Cunggu dan juga nilai-nilai Tri Hita Karana di LPD Desa Adat Cunggu. LPD Cunggu dipilih karena LPD ini memiliki visi dan misi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Tri Hita Karana yang tercermin dari Perarem LPD Desa Adat Cunggu. Pernyataan mengenai fungsi sosialnya dalam bidang ekonomi lokal dan pembangunan keuangan desa berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Data yang disampaikan oleh Kepala dan karyawan LPD diverifikasi dengan membandingkannya pada informasi dari LP LPD, nasabah, dan masyarakat Desa Adat Cunggu. Proses validasi ini dilengkapi dengan analisis deskriptif atas dokumen dan catatan yang relevan dengan peran sosial LPD dalam ekonomi lokal maupun keuangan desa.

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian.**

Nama Informan	Institusi/Lembaga	Keterangan
Bapak Nengah	LP LPD Provinsi	Informasi terkait Visi dan Misi LPD
Bapak Wayan	LPD Desa Adat Cunggu	Informasi terkait Produk dan Kebijakan LPD Desa Adat Cunggu
Ibu Made	LPD Desa Adat Cunggu	Informasi terkait Produk LPD Desa Adat Cunggu
Bapak Ketut	Nasabah	Informasi terkait Produk LPD Desa Adat Cunggu
Ibu Ayu	Nasabah	Informasi terkait Produk LPD Desa Adat Cunggu

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

---

Praktik usaha LPD dilandasi ajaran Tri Hita Karana, yakni menjaga keharmonisan relasi manusia dengan Tuhan, dengan masyarakat, serta dengan alam di sekitarnya (Bagiada & Darmayasa, 2015). Menurut (Darmayasa & Aneswari, 2016) peran LPD dalam memberdayakan masyarakat desa adat berakar pada modal sosial yang mencakup tiga dimensi *Tri Hita Karana*: (1) aspek religius (*Parhyangan*), berupa dukungan pada kegiatan keagamaan; (2) aspek sosial (*Pawongan*), melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan jejaring antarwarga serta institusi; serta (3) aspek lingkungan (*Palemahan*), berupa upaya pelestarian dan penataan ruang hidup.

Konsep *Tri Hita Karana* adalah tujuan yang diharapkan tercapai dalam pelaksanaan operasional LPD. Hal ini tercantum dalam perarem LPD Desa Adat Canggü mewujudkan nilai-nilai dari *Tri Hita Karana* dengan membantu desa adat dalam hal *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Tujuan LPD yang tertuang dalam *parerem* juga mendorong pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang mudah dan cepat yang sesuai dengan adat dan budaya. Secara filosofis tanggung jawab LPD tidak terbatas pada komunitas desa adat meskipun LPD tunduk pada hukum adat, LPD wajib bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders LPD (Darmayasa et al., 2024).

### Konsep *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan LPD dalam pembangunan ekonomi desa

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan krama desa adat dan mendukung pembangunan desa adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, salah satunya adalah *Tri Hita Karana*.

“Sesuai Perda LPD bukan sekadar entitas keuangan, melainkan bagian dari mekanisme kesejahteraan berbasis nilai *Tri Hita Karana*. Ditambah dukungan *perarem* Desa Adat, LPD harus dikelola dengan memperhatikan **harmoni agama, sosial, dan lingkungan**, yang merupakan fondasi budaya Bali.” (Nengah)

#### a. *Parhyangan* (hubungan dengan Tuhan)

Keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhan didasarkan pada konsep Kaula (yang dikuasai) dan Gusti (yang menguasai) (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). Konsep penerapan *parhyangan* dapat diterapkan dalam mengukur sejauh mana LPD berkontribusi terhadap kegiatan ritual keagamaan, renovasi pura, peningkatan kesejahteraan para pemangku, serta pemberian bantuan kepada masyarakat dalam pelaksanaan upacara keagamaan (Bagiada & Darmayasa, 2015; Darmayasa et al., 2021).

Pemahaman LPD mengenai *Tri Hita Karana* tercermin dalam praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak luas terhadap pembangunan ekonomi desa adat Canggü dan masyarakatnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LPD, karyawan LPD dan Nasabah LPD.

“LPD selalu berkontribusi dalam pembangun desa adat. Tercantum dalam *perarem* Desa Adat Canggü bahwa tujuan dibentuknya LPD adalah membantu pembangunan desa adat yang berlandaskan *Tri Hita Karana*. Sebagai Lembaga Keuangan LPD memberikan *punia* berupa uang maupun barang setiap ada upacara di Pura Desa, Puseh, Dalem maupun Pura Dadia, Pura Peletan, dan Pura Sugina yang ada di *wewidangan* Desa Adat Canggü. *Punia* yang diberikan dengan nominal Rp.2.500.000,- per tahun.”

“Selain *punia*, setiap tahun LPD mengalokasikan laba LPD sebesar 20% untuk pembangunan desa adat yang nantinya digunakan untuk perbaikan Pura dan 10% dari laba untuk kegiatan CSR”. (Wayan)

“Setiap hari kami sebelum melakukan aktivitas, selalu diawali dengan sembahyang bersama. Selain itu ketika ada *piodalan* di Pura Desa, Puseh, dan Dalem di Desa Adat Canggü kami pun *nungkil* bersama dan juga menghaturkan *punia*”. (Made)

“Ketika ada *piodalan*, LPD selalu memberikan *punia* baik berupa uang maupun daging babi untuk upacara. Bantuan tersebut meringankan warga dalam *meturunan* ketika *nyanggra piodalan*”. (Ayu)

Hal ini menunjukkan bahwa LPD tidak sekadar lembaga keuangan, tetapi juga aktor kultural yang memperkuat kohesi sosial melalui dukungan terhadap ritual keagamaan. Praktik ini

menegaskan dimensi *Parahyangan* dalam *Tri Hita Karana*, yang memberi legitimasi moral dan spiritual pada aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bagiada & Darmayasa (2015) yang menyatakan bahwa LPD berperan dalam menopang kegiatan adat, namun penelitian ini menambahkan dimensi *Green Accounting*, di mana kontribusi sosial dianggap sebagai bagian dari akuntabilitas keberlanjutan (*social accountability*). Model ini dapat direplikasi oleh lembaga keuangan mikro lain untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga. Transparansi penggunaan dana sosial juga memperkuat legitimasi LPD di mata stakeholder.

**b. Pawongan (hubungan dengan sesama)**

Harmonisasi hubungan antarsesama manusia berlandaskan pada konsep *Tat Twam Asi*, yang bermakna “aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan semua makhluk memiliki hak yang sama.” Penerapan nilai *pawongan* dalam konteks LPD tercermin melalui proporsi karyawan yang berasal dari masyarakat lokal tempat LPD beroperasi, keterlibatan LPD dalam program-program penanggulangan kemiskinan, serta berbagai bentuk partisipasi sosial lainnya (Bagiada & Darmayasa, 2015).

Pihak LPD menerapkan nilai filosofi *Tri Hita Karana*, lembaga ini menjalankan kegiatan usaha yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi desa adat secara menyeluruh dan berkontribusi pada kesejahteraan *krama* desa adat Canggü melalui konsep *Tri Hita Karana*. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LPD, karyawan LPD dan Nasabah LPD.

“LPD Desa Adat Canggü memiliki program dibidang keuangan baik simpanan maupun pinjaman. Dari sisi tabungan, kami ada produk tabungan berjangka yang biasanya digunakan untuk persiapan pendidikan. Kami juga memiliki program khusus berupa tabungan *Sibada*, tabungan ini dikhususkan untuk persiapan dana pendidikan dan untuk persiapan hari raya.”

”Kami mempunyai produk pinjaman dengan bunga harian dikhususkan bagi *krama* yang menjalani bidang usaha yang bersifat musiman. Contohnya ketika *krama* yang memiliki usaha dibidang jula beli sapi, *krama* akan meminjam dana untuk membeli sapi dan menjualnya dalam hitungan hari. Sehingga bunga pinjaman hanya hitungan hari. Hal ini merupakan komitmen LPD untuk menjaga *asset krama* agar tidak jatuh ke *rentenir* ketika kredit bermasalah.” (Wayan)

“Syarat membuka tabungan hanya cukup KTP saja dan diperuntukan untuk *krama*, *krama tamu* dan *tamü*. Penarikan tabungan selain dilakukan dengan datang ke kantor dapat juga dilakukan secara *online*”. (Made)

“Selain produk, LPD memberikan *punia patis* (kedukaan) sebesar Rp.2.000.000,- kepada setiap *krama* desa adat dan tambahan Rp.500.000,- bagi nasabah LPD. Selain itu juga LPD memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu di wewidangan desa adat Canggü.”(Ketut)

”LPD setiap tahunnya memberikan bantuan kepada sekaa teruna untuk pembuatan ogoh ogoh.” (Ayu)

Produk inovatif ini menekankan prinsip inklusi keuangan dan perlindungan sosial. Kerangka *Triple Bottom Line* menegaskan, aspek ini memperkuat pilar *People* karena secara langsung meningkatkan kesejahteraan warga desa. Penelitian (Darmayasa & Aneswari, 2016) hanya menyoroti fungsi simpan pinjam secara umum, penelitian ini menunjukkan adanya inovasi produk keuangan yang berakar pada kebutuhan sosial lokal. Hal ini juga memperkuat temuan (Widnyani & Astitiani, 2022) tentang peran LPD dalam redistribusi ekonomi, namun lebih fokus pada aspek perlindungan terhadap kelompok rentan. Produk berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi keunggulan kompetitif LPD di era digital, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada sistem kredit informal yang merugikan.

**c. Palemahan (hubungan dengan lingkungan)**

Keharmonisan manusia dengan alam digambarkan melalui analogi janin dalam rahim, di mana

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

---

manusia diibaratkan sebagai janin dan lingkungan sebagai rahim yang menopang kehidupannya. Ketika manusia merusak lingkungan, sama halnya dengan merusak tempat yang menjaga keberadaannya sendiri, sehingga dampak negatifnya akan kembali dirasakan oleh manusia itu sendiri (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). Kata *palemahan* berakar dari *lemah* yang berarti tanah atau permukiman. Dalam konteks Tri Hita Karana, palemahan menggambarkan dimensi ekologis yang menitikberatkan pada keterhubungan manusia dengan lingkungan alam dan fisik sekitarnya (Bagiada & Darmayasa, 2015).

Pihak LPD menerapkan nilai filosofi *Tri Hita Karana*, dimana lembaga mengelola suatu bisnis yang menghasilkan dampak positif untuk pembangunan ekonomi desa adat yang berkaitan dengan konsep *palemahan*. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LPD, karyawan LPD dan Nasabah LPD.

“Setiap tahunnya kami memberikan 10% dari laba LPD untuk Desa Adat sebagai dana CSR. Dana CSR tersebut digunakan oleh desa adat untuk pengelolaan sampah, perbaikan taman di *jaba Pura* dan keperluan pembangunan desa adat lainnya”.

“Kami dalam mengoperasionalkan LPD juga sudah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi, dampaknya biaya kertas yang dikeluarkan menjadi turun dan ramah lingkungan”. (Wayan)

“Setiap jumat pagi kami karyawan LPD melakukan aksi bersih lingkungan setelah di wilayah desa adat.” (Made)

“LPD membayar gaji petugas kebersihan pembersihan di setiap Pura di Desa Adat Canggü. Pura menjadi bersih dan menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Canggü”. (Ketut).

Praktik ini menggambarkan internalisasi nilai lingkungan dalam aktivitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa LPD tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menginternalisasi dimensi keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan pilar *Planet* dalam TBL. Berbeda dengan penelitian (Ariasih & Suarmanayasa, 2024) yang menempatkan Tri Hita Karana pada pariwisata, penelitian ini menekankan penerapannya pada sektor keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan implementasi Tri Hita Karana ke dalam praktik akuntansi berkelanjutan di lembaga tradisional. Program CSR yang diarahkan pada pengelolaan sampah, penghijauan, atau pelestarian lingkungan desa dapat meningkatkan citra positif LPD sekaligus memperkuat keberlanjutan jangka panjang.

LPD Desa Adat Canggü memiliki landasan nilai filosofi *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan LPD yang bertujuan membangun ekonomi desa. LPD Canggü mampu menyeimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan yaitu *parhyangan*. Bantuan yang diberikan LPD Desa Adat Canggü dikaitkan dengan *parhyangan* dapat meringankan warga, bantuan yang diberikan mampu memangkas peturunan yang harus dikeluarkan warga baik berupa uang maupun banten.

Landasan *Tri Hita Karana* pada aspek *pawongan* yang diterapkan LPD dalam pembangunan ekonomi desa tercermin dari tujuan produk keuangan yang diluncurkan LPD Desa Adat Canggü. Dari sisi tabungan sangat dirasakan masyarakat dalam mempersiapkan keperluan hari raya, pendidikan dan lain sebagainya. Aspek produk pinjaman yang dikhususkan bagi krama yang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan cepat. Sisi pelayanan terhadap nasabah pun LPD Desa Adat Canggü hadir lebih dekat dengan perpaduan pelayanan secara *offline* dan *online*. Digitalisasi menghapus batas-batas wilayah dan menciptakan bisnis yang terbuka (Sukarta, Setyastrini, et al., 2024)

Landasan Tri Hita Karana pada aspek *palemahan* yang diterapkan LPD dalam pembangunan ekonomi desa tercermin dari tujuan produk keuangan yang diluncurkan LPD Desa Adat Canggü. Konsep palemahan dilakukan dengan menjaga lingkungan secara berkesinambungan melalui adopsi sistem pendukung keputusan sesuai dengan *green accounting technology* (Darmayasa, 2023, 2024; Darmayasa et al., 2021, 2024; Widhyadanta & Sukarta, 2025.). Konsep keberlanjutan bagi LPD mencakup bukan hanya kelangsungan operasional lembaga, tetapi juga kontribusi jangka panjangnya terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa (Sukarta, Dananjaya, et al., 2024).

Konsep alokasi laba yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2017, mewajibkan dana 20% untuk desa dan 5% untuk dana sosial kemasyarakatan (Indriyani & Putra, 2022). Upaya ini dapat menjadi strategi pembangunan desa berbasis *palemahan*, yaitu dengan mengalokasikan sebagian laba untuk pelestarian lingkungan serta mencegah alih fungsi lahan sawah dan kebun, sekaligus membuka peluang bagi LPD untuk mengelola lahan tersebut sebagai unit usaha produktif (Widnyani & Astitiani, 2022).

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

---

LPD Desa Adat Cangu membuktikan dirinya bukan hanya sebagai lembaga keuangan tradisional yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai pilar utama pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tercermin dari pertumbuhan keuangan yang signifikan, disertai kontribusi nyata terhadap pelestarian adat, budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan menjadikan nilai-nilai *Tri Hita Karana* sebagai dasar pijakan, LPD mampu menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan (*Palemahan*). Penerapan filosofi *Tri Hita Karana* semakin memperkuat praktik *Green Accounting*, di mana aspek sosial dan lingkungan terintegrasi ke dalam aktivitas serta kebijakan lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal yang menekankan keberlanjutan dan keharmonisan. LPD Desa Adat Cangu dengan demikian merepresentasikan model kelembagaan ideal yang inklusif, akuntabel, dan berbasis nilai-nilai budaya.

### SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Cangu bukan sekadar lembaga keuangan tradisional, tetapi juga pilar pembangunan desa berkelanjutan. Filosofis dan nilai dari *Tri Hita Karana* terbukti terinternalisasi dan menjiwai kegiatan operasional LPD melalui dukungan kegiatan keagamaan, inovasi produk keuangan berbasis kebutuhan sosial, serta program ramah lingkungan. Integrasi ini memperkuat penerapan *Green Accounting* dan sejalan dengan kerangka *Triple Bottom Line*. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara akademis dalam memperluas kajian integrasi akuntansi berkelanjutan dengan kearifan lokal, sekaligus memberi implikasi praktis bagi LPD dan pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan pada penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus LPD dengan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi masih terbatas dan belum mendalami aspek kuantitatif *Green Accounting*. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dengan menambah ruang lingkup objek kajian ke beberapa LPD atau lembaga tradisional lain, menggunakan metode campuran (*mixed methods*), serta menghubungkan praktik berbasis *Tri Hita Karana* dengan standar global seperti GRI atau SDGs. Selain itu, konsep ini dapat diuji pada koperasi atau BUMDes untuk memperkaya pemahaman tentang integrasi *Green Accounting* dan kearifan lokal di berbagai konteks kelembagaan.

### REFERENCE

- Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1236–1243.
- Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke, 4*, 798–815.
- Damayanti, N., Ustriyana, I. N. G., & Djelantik, A. W. S. (2019). Peranan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Penyaluran Kredit Pertanian Di Desa Adat Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. *Agrisociomics: Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3(2), 87–97.
- Darmayasa, I. N. (2023). Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 98–114.
- Darmayasa, I. N. (2024). Understanding Digital Transformation Village Credit Institutions Towards Sustainability Based On Local Genius. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 18–24.
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom To Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi*

## Green Accounting: Implementasi Tri Hita Karana dalam Membangun Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

---

*Multiparadigma*, 7(1), 110–119.

- Darmayasa, I. N., Suwintana, I. K., Puspita, N. N. H., Putrayasa, I. M. A., Parnata, I. K., Bagiada, I. M., Setyastrini, N. L. P., Nurhayanti, K., Suprpto, P. A., & Dewi, N. K. U. K. (2024). Anti-Aggressive Accounting Creative Pada Lembaga Perkreditan Desa Menuju Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Elkington, J. (1999). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business*. Capstone. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=F11gqgaacaj>
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial Lpd Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 168–174.
- Jati, N. N. A. S., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. (2024). *Peran Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Duda Dalam Pelaksanaan Program Kelayusekaran Serta Beasiswa*. Retrieved January.
- Junaedi, I. W. R., Santosa, D. S. S., & Waruwu, D. (2021). Peran Lembaga Perkreditan Desa Bagi Anggota Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 91–98.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. In *Sage Publication*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Upn” Veteran ....
- Sadiartha, A. (2017). Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang Keajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(2), 1–18.
- Sukarta, M. A. P., Dananjaya, I. B. G., & Setyastrini, N. L. P. (2024). Role Stress Dan Turnover Intention: Studi Empiris Menggunakan Perspektif Teori Peran. *Analisis*, 14(2), 340–358.
- Sukarta, M. A. P., Setyastrini, N. L. P., & Darmayasa, I. N. (2024). Pendampingan Transformasi Digital LPD Desa Adat Sesandan. *Madaniya*, 5(3), 756–763.
- Widhyadanta, I. G. D. S. A., & Sukarta, M. A. P. (2025). Persepsi Karyawan LPD Se-Kecamatan Denpasar Utara Terhadap Efektivitas Penerapan Sia, Kecanggihan Teknologi Informasi. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 17(1), 2025–2139. <https://doi.org/10.22225/Kr.17.1.2025.139-146>
- Widnyani, N. M., & Astitiani, N. L. P. S. (2022). Standar Budaya Kerja Berbasis Kearifan Lokal Tri Hita Karana Bagi Lembaga Perkreditan Desa Di Bali. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 193–201. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v10i1.48756>